

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi nasional abad ke-21 masih akan tetap berbasis pertanian secara luas. Sejalan dengan tahapan-tahapan perkembangan ekonomi maka kegiatan jasa dan bisnis yang berbasis pertanian juga akan meningkat, yaitu kegiatan agribisnis (agroindustri) akan menjadi salah satu kegiatan unggulan pembangunan ekonomi nasional dalam berbagai aspek yang luas (Saragih, 2010).

Salah satu tujuan pembangunan pertanian adalah untuk meningkatkan produksi hasil pertanian. Hasil-hasil pertanian membutuhkan pasar serta harga yang cukup tinggi untuk membayar kembali biaya-biaya tunai dan daya upaya yang telah dikeluarkan petani sewaktu memproduksinya sehingga pasar menjadi salah satu syarat mutlak dari pembangunan pertanian sebaliknya pertanian juga berperan dalam terbentuk dan berkembangnya pasar (Mosher, 1987 dalam Widi, 2014)

Pelaku utama dalam pembangunan pertanian adalah petani. Petani diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola usahatani sehingga dapat mengatasi permasalahan yang ada, baik dalam peningkatan produksi maupun dalam peningkatan pendapatan dan pengembangan usaha pertanian. Oleh karena itu, kapasitas dan kemampuan petani harus ditingkatkan, salah satunya melalui penyuluhan pertanian dengan pendekatan kelompok (Mardikanto, 2007).

Mayoritas petani memiliki skala usaha yang kecil, akses terbatas dan posisi tawar yang lemah di pasar, Kementerian Pertanian memiliki kegiatan pemberdayaan kelembagaan petani, salah satunya melalui kelompok tani/gabungan kelompok tani (Gapoktan). Pada dasarnya kelompok tani oleh dan untuk petani guna mengatasi masalah bersama dalam usahatani serta menguatkan menguatkan posisi tawar, baik dalam pasar sarana maupun pasar produk (Swastika, 2011).

Salah satu sektor pertanian yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat Indonesia adalah sektor perkebunan. Perkebunan telah memberikan pengaruh berbagai sendi kehidupan di beberapa masyarakat Indonesia dari sosial budaya, politik dan lingkungan. Bagi beberapa pihak pembangunan pedesaan lewat perkebunan adalah pembangunan untuk kemakmuran, tetapi bagi beberapa pihak lain menyatakan pembangunan pedesaan salah satunya lewat pembangunan perkebunan adalah modernisasi tanpa pembangunan.

Komoditi perkebunan yang penting salah satunya adalah gambir (*Uncaria gambier Roxb*). Tanaman gambir merupakan tanaman perdu, termasuk salah satu diantara *Rubiace* (kopi-kopian), memiliki nilai ekonomi yang tinggi, yaitu dari ekstrak (getah) daun dan ranting mengandung asam *katechu tannat (tanin)*, *katechin*, *pyrocatecol*, *florisin*, lilin, *fixed oil*. Gambir merupakan komoditi yang memiliki volume dan nilai ekspor yang tinggi (Lampiran 1). Tanaman gambir merupakan komoditi unggulan Sumatera Barat. Produksi dan luas lahan terbesar adalah di Kabupaten 50 Kota (Lampiran 4).

Komoditi gambir sangat memerlukan pasar. Agar pasar berfungsi dengan baik dan dapat menciptakan keuntungan, diperlukan kelembagaan yang kuat melalui aturan main yang jelas. Aturan main yang jelas untuk penegakan norma tingkah laku kelompok-kelompok yang bertransaksi, guna mengurangi biaya transaksi tinggi. Biaya transaksi tinggi terjadi karena ketidaksetaraan informasi di pasar. Ketidaksetaraan informasi akibat kemampuan individu yang bertransaksi terbatas, mendapatkan keuntungan melalui praktik yang tidak jujur dalam kegiatan transaksi atau main curang serta melalaikan kewajiban sehingga perlu mengembangkan informasi yang sama di antara pelaku pasar (North, 1990 dalam Nasrul, 2017). Menurut Anwar (2001) faktor-faktor yang diatur dan dikendalikan dalam aturan main di pasar meliputi harga-harga, kuantitas, kualitas dan pengaturan manfaat dalam pertukaran (*terms of exchange*). Aturan-aturan main ini tentunya harus didesain sedemikian rupa sehingga manfaat dari pertukaran bisa memberikan nilai tambah yang lebih adil dan merata.

Mengingat pentingnya komoditi gambir ini, maka perlu perhatian yang lebih besar lagi terhadap pengembangan produksi gambir di Sumatera Barat.

Khusus untuk perkebunan rakyat, tujuan utama pengembangannya adalah untuk mengangkat harkat hidup petani dan keluarganya dengan cara meningkatkan produksi dan pendapatan usahatani melalui pengembangan kebun (Muyana, 2008). Namun tingginya tingkat produksi tidak menjamin meningkatkan pendapatan petani. Hal ini dikarenakan gambir sering mengalami penurunan harga dan petani memiliki posisi tawar yang lemah. Oleh karena itu, perlu dilihat kondisi pemasaran gambir dan upaya penguatan posisi tawar petani gambir di Nagari Koto Lamo.

## **B. Rumusan Masalah**

Tanaman gambir merupakan tanaman yang memiliki volume dan nilai ekspor yang tinggi. Pada Lampiran 1 dapat dilihat perkembangan volume dan nilai ekspor gambir Indonesia dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Nilai ekspor gambir tertinggi Indonesia yaitu pada tahun 2017 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2018. Walaupun demikian, harga gambir di tingkat petani sangat rendah jika dibandingkan dengan harga ekspor.

Tanaman gambir merupakan salah satu tanaman perkebunan yang tumbuh di Indonesia. Tanaman gambir di Indonesia dapat ditemukan di Kepulauan Riau, pantai Timur Sumatera, Indragiri, Bangka Belitung, Kalimantan Barat dan Sumatera Barat. Sentra perkebunan gambir di Indonesia adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Papua (Amos, 2005 dalam Indra, 2017).

Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau merupakan provinsi sentra produksi gambir Sumatera. Diantara keempat sentra produksi gambir tersebut, provinsi Sumatera Barat merupakan sentra produksi gambir terbesar yang memasok gambir (Lampiran 3).

Sumatera Barat telah mengukuhkan gambir sebagai komoditi unggulan daerah semenjak tahun 2008. Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan lokasi lahan gambir yang paling luas di Sumatera Barat (Lampiran 4) dan memiliki kontribusi yang cukup besar sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus sebagai sumber mata pencarian 32.418 keluarga petani karena keberadaannya sebagai sentra gambir terbesar. Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 9 kecamatan penghasil gambir dari 13 kecamatan yang menjadi wilayah

administrasinya. Masing-masing kecamatan memiliki luas areal penanaman dan produksi gambir yang beragam. Berdasarkan data statistik perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2017 diketahui bahwa terdapat 3 sentra utama penghasil gambir, yaitu Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Bukit Barisan dengan produksi masing-masing 3.789,65 ton, 2.741,64 ton dan 1.755,8 ton (Lampiran 5). Dari ketiga kecamatan tersebut, Kecamatan Kapur IX merupakan kecamatan yang letak geografisnya paling jauh dari pusat pemerintahan, namun memiliki luas lahan dan produksi gambir yang paling besar di Kabupaten Lima Puluh Kota serta memiliki pasar gambir (Nasution, 2015).

Jumlah produksi gambir di Kecamatan Kapur IX dari tahun 2008 sampai tahun 2018 dapat dilihat pada Lampiran 6. Produksi gambir tertinggi di Kecamatan Kapur IX adalah pada tahun 2010 dan produksi terendah pada tahun 2011.

Nagari Koto Lamo adalah salah satu nagari yang ada di Kecamatan Kapur IX. Nagari Koto Lamo merupakan salah satu nagari penghasil gambir terbesar di Kabupaten Lima Puluh Kota (BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, 2010). Mayoritas mata pencaharian masyarakat Nagari Koto Lamo adalah sebagai petani gambir. Budidaya gambir telah berlangsung lama di Nagari Koto Lamo, tetapi kehidupan petani gambir belum sejahtera. Petani gambir di Nagari Koto Lamo memiliki lahan dan modal sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa petani di Nagari Koto Lamo telah mandiri, dan tidak tergantung kepada pedagang atau lembaga keuangan lainnya. Hasil produksi gambir petani di Nagari Koto Lamo pada umumnya langsung dijual ke pedagang pengumpul/toke dengan mengangkut sendiri ke pasar, sehingga pasar gambir sangat dibutuhkan oleh petani.

Menurut Dimiyati (2007) dalam Parma (2014) permasalahan yang masih melekat pada sosok petani dan kelembagaan petani di Indonesia adalah : peran dan fungsi kelembagaan petani sebagai wadah organisasi petani belum berjalan secara optimal. Untuk mengatasi permasalahan di atas maka perlu dilakukan upaya penguatan kelembagaan petani dan diharapkan dapat melindungi posisi tawar petani, dimana petani tidak menjual hasil produksi gambir secara sendiri-sendiri, tetapi berkelompok. Dengan begitu, pedagang pengumpul (*toke*) tidak akan bisa menetapkan harga secara sepihak.

Kelembagaan petani belum berfungsi optimal untuk meningkatkan posisi tawar. Kelembagaan petani seringkali muncul karena adanya kepentingan tertentu, misalnya dalam hal menerima bantuan seperti pupuk dan lain-lain, sehingga belum mampu meningkatkan kemandirian petani untuk kesejahteraannya.

Di Nagari Koto Lamo, ada petani yang membentuk kelompok dan ada juga yang tidak. Akan tetapi, kelompok yang dibentuk tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tidak ada kegiatan yang dilakukan untuk menunjang usahatani masing-masing anggota kelompok. Kelompok dibentuk hanya untuk menerima bantuan dari pemerintah, seperti subsidi pupuk, bibit tanaman jagung, dan lain-lain. Setelah menerima bantuan, anggota kelompok bahkan tidak pernah berkumpul lagi.

Petani di Nagari Koto Lamo menjual gambir ke pedagang pengumpul di pasar gambir secara sendiri-sendiri. Harga gambir ditetapkan oleh pedagang pengumpul, sedangkan petani hanya sebagai penerima harga (*price taker*). Keinginan petani untuk bisa segera menerima pembayaran gambir adalah salah satu penyebab posisi tawar petani lemah. Walaupun harga yang ditawarkan oleh pedagang pengumpul rendah, petani akan tetap menjual gambirnya dan tidak melakukan penyimpanan terlebih dahulu karena kebutuhan yang harus dipenuhi setiap minggu.

Selain itu, struktur pasar gambir di Nagari Koto Lamo adalah oligopsoni (banyak penjual sedikit pembeli) sehingga posisi tawar yang kuat dimiliki oleh pedagang pengumpul. Selain struktur pasar, lemahnya posisi tawar petani juga disebabkan karena lemahnya jaringan (*network*) petani dengan pihak luar. Petani hanya bisa menjual gambir ke pedagang pengumpul. Jika ada orang yang berperan sebagai penggerak atau penghubung antara petani dengan pihak luar, maka petani akan bisa menguatkan posisi tawarnya atau memperoleh harga jual yang lebih tinggi dibandingkan menjual gambir ke pedagang pengumpul. Oleh karena itu, perlu penguatan posisi tawar petani gambir agar harga tidak bisa dikendalikan oleh pedagang pengumpul dan masing-masing pelaku dalam pemasaran gambir mendapatkan keuntungan yang sewajarnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka muncul pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi pemasaran gambir di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota?
2. Bagaimana upaya penguatan posisi tawar petani gambir di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan kondisi pemasaran gambir di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota.
2. Mendeskripsikan upaya penguatan posisi tawar petani gambir di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan hasilnya dapat bermanfaat untuk :

1. Bagi petani, yaitu sebagai masukan dan informasi sehingga dapat membantu dalam upaya penguatan posisi tawar petani.
2. Bagi pemerintah daerah selaku pengambil kebijakan, yaitu sebagai pedoman dalam membuat kebijakan terkait pemasaran gambir.
3. Bagi penulis sendiri yaitu dapat meningkatkan pemahaman mengenai penguatan posisi tawar petani gambir, dan bagi mahasiswa lain dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian tentang kasus ini.